

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD), KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP), STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA SKPD DI KOTA JAMBI**

Jihan Amelsi Dwi Sakti<sup>1</sup>, Rosmeli<sup>2</sup>, Putri Intan Suri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

<sup>1</sup>[jihansaktinn@gmail.com](mailto:jihansaktinn@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The implementation of the Regional Government Information System (SIPD) is a strategic step to improve the quality of financial reports. This study aims to determine the effect of SIPD, human resource (HR) competency, the government internal control system (SPIP), and government accounting standards (SAP) on the quality of local government financial reports in Jambi City. Using a Likert scale and saturated sampling method with 40 respondents from the BPKAD, Disperindag, and Disdukcapil, data were analyzed using multiple linear regression. The results show that the implementation of SIPD and related variables contribute significantly to the reliability and transparency of financial reporting.*

**Keywords:** *SIPD, financial report quality, regional finance*

**ABSTRAK**

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh SIPD, kompetensi sumber daya manusia (SDM), sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), dan standar akuntansi pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Jambi. Dengan Menggunakan skala likert dan metode sampling jenuh dengan 40 responden dari BPKAD, Disperindag, dan Disdukcapil, data dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD dan variabel terkait berkontribusi signifikan terhadap keandalan dan transparansi pelaporan keuangan.

**Kata kunci:** SIPD, kualitas laporan keuangan, keuangan daerah

**A. Pendahuluan**

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada

daerah sehingga memungkinkan daerah untuk dapat lebih leluasa dan fleksibel dalam menentukan arah

pembangunan di daerah sesuai dengan potensi, kondisi dan aspirasi yang berkembang dimasyarakat (Rosmeli,2017).

Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah paling sedikit terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan (PP RI, 2019). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Tujuan umum dari laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja suatu entitas pelapor yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan. Pengguna keputusan membutuhkan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan, sehingga laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan prosedur pelaporan keuangan daerah (Firmansyah, 2022).

Laporan keuangan yang berkualitas juga dapat dilihat dari opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) lalu memberikan penilaian berupa opini terhadap LKPD tersebut. Hasil audit yang diberikan oleh BPK terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Dalam hal ini, apabila BPK memberikan opini WTP terhadap LKPD, berarti laporan keuangan entitas tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Opini WTP diberikan oleh BPK apabila entitas memenuhi kriteria SPI memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP (Isdayanto, 2024).

SIPD bertujuan untuk mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat, meningkatkan pemahaman, dan menjadi acuan bagi provinsi serta kabupaten/kota dalam perencanaan, pengendalian, beserta evaluasi pembangunan daerah, juga

pengelolaan finansial yang akuntabel dan transparan. SIPD memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas dan bersifat terintegrasi SIPD mencakup Informasi Pembangunan daerah, Informasi Keuangan Daerah, Informasi Pemerintahan Daerah. Tujuan utamanya adalah menyatukan seluruh proses tata kelola pemerintahan daerah dari perencanaan hingga evaluasi dalam satu sistem terpusat (Maulidatul, 2025).

Menyusun laporan keuangan yang akurat dan relevan. Selain itu, literasi keuangan juga mendukung penggunaan aplikasi keuangan digital, yang dapat meningkatkan efisiensi pencatatan keuangan, mengurangi potensi kesalahan, dan memberikan visibilitas yang lebih baik terhadap kesehatan keuangan keuangan bukan hanya menjadi landasan untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam penyusunan laporan keuangan yang mendukung pengambilan keputusan strategis dan memenuhi (Suri, 2024).

Alasan pemilihan SKPD Kota Jambi sebagai tempat penelitian dikarenakan laporan keuangan pemerintah Kota Jambi selalu

mendapatkan opini WTP sejak periode TA 2016 sampai TA 2024. Hal ini dapat mengindikasikan tidak adanya perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Jambi. Akan tetapi berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Pemerintah Kota Jambi selalu terdapat dengan masalah pengelolaan aset daerah yang tidak optimal, kesalahan klasifikasi anggaran, ketidaksesuaian dalam pembayaran dan perhitungan pajak, serta kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Temuan tersebut mengindikasikan adanya risiko penurunan kualitas laporan keuangan jika tidak segera ditangani dengan baik, artinya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Jambi masih perlu ditingkatkan. Kelemahan tersebut juga dapat berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah (BPK RI, 2024).

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) Peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung pada objek penelitian di SKPD Kota

Jambi. Metode yang digunakan adalah metode survey, yaitu pengumpulan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner (angker) kepada para staf atau pegawai SKPD di Kota Jambi. Kuesioner ini berisi serangkaian pertanyaan tertulis yang dirancang untuk mengukur persepsi responden mengenai SIPD, SDM, SPIP, SAP serta dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan.

Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif metode ini mendeskripsikan ciri-ciri atau profil responden untuk memberikan konteks pada penelitian. Data yang digunakan informasi demografi responden.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan metode sampling jenuh terhadap 40 responden di BPKAD, Disperindag, dan Disdukcapil Kota Jambi, dilakukan analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis penelitian. Sebelum dilakukan uji hipotesis, data telah dinyatakan lulus uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser. Hasil pengujian menunjukkan

bahwa model regresi layak digunakan untuk memprediksi kualitas laporan keuangan daerah.

signifikan pada hasil uji t (parsial), di mana hanya variabel SPIP yang terbukti memiliki pengaruh signifikan secara statistik terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Sig. 0,001 < 0,05).

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS 26, diperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Data yang dianalisis berasal dari 40 responden yang merupakan praktisi pengelola keuangan di instansi pemerintah Kota Jambi.

**Tabel 1 Uji Regresi Berganda**

Model	B	Std. Error	t	Sig.
(Constant)	17.364	10.310	1.684	0.101
X1 SIPD	0.250	0.156	1.602	0.118
X2 SDM	-0.355	0.413	- 0.858	0.397
X3 SPIP	0.587	0.165	3.555	0.001
X4 SAP	-0.049	0.067	- 0.736	0.466

Hasil pengujian pada Tabel 1 menunjukkan bahwa dari empat variabel yang diuji, hanya Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Kota Jambi. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,001, yang jauh lebih kecil dari standar signifikansi 0,05.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan hasilnya tidak mendukung hipotesis pertama bahwa penerapan SIPD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini menunjukkan bahwa H1 ditolak. Nilai signifikan SIPD yaitu  $0,181 > 0,05$  yang berarti variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini tersebut dibuktikan dengan nilai thitung  $0,181 < \text{tabel } 2,030$ , artinya SIPD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD Kota Jambi. Berdasarkan hasil data yang didapat bahwa SIPD yang baik tidak memberikan dampak terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan hasilnya tidak mendukung hipotesis kedua bahwa SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini

menunjukkan bahwa H2 ditolak. Nilai signifikan SDM yaitu  $0,397 > 0,05$  yang berarti variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai thitung  $-0,858 < \text{tabel } 2,030$  artinya SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD Kota Jambi. Berdasarkan hasil data yang didapat bahwa SDM yang baik tidak memberikan dampak terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan hasilnya mendukung hipotesis ketiga bahwa SPIP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini menunjukkan bahwa H3 diterima. Nilai signifikansi SPIP sebesar  $0,001 < 0,05$  yang berarti variabel independent berpengaruh terhadap dependen. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai thitung  $3,555 > \text{tabel } 2,030$ . Artinya SPIP telah diterapkan secara optimal di SKPD Kota Jambi.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan hasilnya tidak mendukung hipotesis keempat SAP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini

menunjukkan bahwa H4 ditolak. Nilai signifikan SAP  $0,466 > 0,05$  yang berarti variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai thitung  $-0.736 < t_{tabel} 2,030$ , artinya SAP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang di hasilkan oleh SKPD Kota Jambi. Berdasarkan hasil data yang didapat bahwa SAP yang baik tidak memberikan dampak terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian dilihat bahwa SIPD, SDM, SPIP, dan variabel SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan jambi 2025. Hal ini dapat ditentukan dengan menggunakan F hitung pada masing-masing- variabel lebih dari tabel F. Selain itu, Adjusted R-squared untuk riset ini adalah 0,361. Hal ini menunjukkan bahwa SIPD, SDM, SPIP, SAP berpengaruh signifikan terhadap kaulitas laporan keuangan SKPD Kota Jambi.

#### **D. Kesimpulan**

Hal ini terlihat dari hasil analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa rata rata responden memahami tugas pokok dan fungsinya serta memiliki

latar belakang pendidikan yang relevan dengan bidang keuangan daerah.

Implementasi sistem ini telah membantu proses penginputan data keuangan secara terintegrasi, meskipun dalam pelaksanaanya masih ditemukan beberapa kendala teknis operasional.

Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD di Kota Jambi. Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD di Kota Jambi. Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD di Kota Jambi. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD di kota Jambi. Secara bersama-sama SIPD, SDM, SPIP, SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD di Kota Jambi.

Berdasarkan pembahasan kesimpulan diata maka penelti menyarankan bahwa:

Penelitian yang telah dijalankan harapannya Diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan secara menyeluruh dengan cara mengoptimalkan infrastruktur teknologi dan jaringan untuk mendukung SIPD, serta rutin menyelenggarakan pelatihan teknis bagi SDM pengelola keuangan. Selain itu, penguatan fungsi pengawasan melalui SPIP dan kepatuhan yang konsisten terhadap SAP mutlak diperlukan agar proses pelaporan menjadi lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan regulasi terbaru.

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat menambah beberapa jumlah variabel lain yang menjadi fenomena yang mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Bagi penelitian selanjutnya dapat melakukan pendekatan yang lebih baik terhadap responden agar responden dapat mengisi kuesioner dengan lebih termotivasi serta netral dan objektif sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan mampu mengembalikan kuesioner sesuai dengan waktu yang ditetapkan

Bagi penelitian selanjutnya bisa menambahkan metode wawancara agar data yang didapatkan lebih

akurat dan jelas serta lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini karena peneliti dapat mengkomunikasikan secara langsung kepada responden terkait poin-poin kuesioner sehingga tidak terdapat kesalahpahaman atau salah tafsir dalam membaca pertanyaan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- PP RI. (2019). Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. In Oxford English Dictionary.  
<https://doi.org/10.1093/oed/9600622025>.
- Maulidatul, R., Ratnawati, V., & Silfi, A. (2025). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan Teknologi , Pengelolaan Aset terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating ( Studi pada OPD Ka. Jurnal Ekonomi, 27(1), 82–91.
- Isdayanto, A. (2024). Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

- Daerah (Studi Kasus pada OPD Pemerintah Kota Jambi). Universitas Jambi.
- Firmansyah, A., Yuniar, M. R., & Arfiansyah, Z. (2022). Kualitas Laporan Keuangan Di Indonesia: Transparansi Informasi Keuangan Dan Karakteristik Pemerintah Daerah. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*,4(2), <https://doi.org/10.33827/akuras2022.vol4.iss2.art180>.
- Dodi Chandra, Syurya Hidayat, Rosmeli (2017). Dampak dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi 67-76.
- Dica Lady Silvera, Heriyani, Putri Intan Suri (2024). Peningkatan Literasi Keuangan Pada UMKM Lapis Angso Duo Jambi Melalui Pelatihan dan Pendampingan Pembukuan Sederhana Menggunakan Aplikasi UKM.
- Ariyanto, S. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018. *Jurnal Valuta*, 6(1), 41–54.
- BPK RI. (2024b). Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan LHP BPKRI Provinsi Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi. <https://www.bpkad.jambikota.go.id/berita/detail/penyampaian-laporan-hasil-pemeriksaan-lhpbpkri-prov-jambi-atas-laporan-keuangan-pemerintah-kota-jambi>.